

KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH BERBASIS KOMPETENSI¹

S. HAMID HASAN
(UPI)

PENDAHULUAN

Pada masa awal abad ke 21 pendidikan di Indonesia, terutama dalam aspek pengembangan kurikulum, mengalami proses perubahan yang sangat mendasar. Perubahan tersebut terjadi dengan adanya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kedua peraturan tersebut mendasarkan perubahan sistem pendidikan berdasarkan perubahan sistem ketatanegaraan/pemerintahan dari pemerintahan yang sentralistis ke pemerintahan yang memberikan otonomi ke pemerintahan daerah (propinsi dan kabupaten/kota). Pendidikan sebagai bagian dari aspek pelayanan masyarakat yang didelegasikan ke pemerintah daerah maka UU nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 19 tahun 2005 memberikan wewenang pengembangan kurikulum dibandingkan masa sebelumnya. Meski pun demikian, dalam rangka mengembangkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam negara kesatuan Republik Indonesia maka proses pengembangan kurikulum yang dikembangkan dalam kedua dokumen pendidikan tersebut memberikan tempat bagi pemerintah pusat yang cukup esensial yaitu menentukan standar isi dan standar kompetensi kelulusan.

Pengembangan kurikulum pendidikan sejarah tak dapat dilepaskan dari konteks yang telah ditetapkan oleh kedua dokumen pemerintah tersebut. Oleh karena itu makalah ini membahas mengenai posisi legal kurikulum pendidikan sejarah berdasarkan kedua dokumen pendidikan tersebut, organisasi konten pendidikan sejarah, kompetensi dan materi pendidikan sejarah, pengembangan kurikulum sejarah pada tingkat satuan pendidikan, proses pendidikan sejarah, dan evaluasi hasil belajar pendidikan sejarah.

PERTANYAAN DASAR KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH

Pengembangan kurikulum pada tingkat nasional sudah harus memperhitungkan keseluruhan pengembangan kurikulum. Ketika suatu kurikulum baru pendidikan sejarah dikembangkan ada pertanyaan dasar yang diajukan dan harus dijawab oleh para pengembang kurikulum pada tingkat nasional yang dirumuskan pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Pertanyaan dasar itu perlu diajukan karena pada dasarnya kurikulum adalah jawaban pendidikan untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Sesuai dengan konteks baru pengembangan kurikulum sejarah maka jawaban tersebut adalah dalam bentuk keputusan mengenai standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan sejarah. Ketetapan mengenai standar isi dan kompetensi lulusan pendidikan sejarah ini adalah jawaban kurikulum pendidikan sejarah terhadap masalah bangsa

¹ Dibahas dalam Seminar Pendidikan Sejarah di Jurusan Sejarah UNNES tanggal 16 April 2007

yang berkembang pada saat sekarang dan masa 5 – 10 tahun mendatang. Ketetapan itu yang kemudian menjadi pegangan lebih lanjut bagi guru untuk dikembangkan menjadi kurikulum sekolah (KTSP), sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah atau kelas yang dibina oleh guru.

Pertanyaan dasar tersebut diajukan berdasarkan pandangan filosofis kurikulum para pengembang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Pertanyaan dasar tersebut dapat berupa jawaban mengenai kualitas kehidupan apa yang harus dimiliki generasi yang akan datang dan kualitas setiap individu anggota generasi yang akan datang tersebut. Kualitas yang dikehendaki tersebut haruslah menjadi tanggungjawab berbagai mata pelajaran dalam kurikulum dan diantaranya kurikulum pendidikan sejarah. Ada kualitas generasi yang datang tersebut bersifat umum dan fundamental sehingga menjadi tanggungjawab semua mata pelajaran tetapi ada juga yang bersifat khusus dan menjadi tanggungjawab khusus pendidikan sejarah yang tidak dibagi dengan mata pelajaran lain.

Dengan pertanyaan tersebut para pengembang kurikulum (SI dan SKL) memang harus memiliki gambaran tentang kehidupan bangsa di masa mendatang. Gambaran kualitas kehidupan itu dibandingkan dengan kualitas yang telah dimiliki pada masa kini. Perbedaan antara kualitas yang seharusnya dimiliki di masa mendatang dan kualitas yang telah dimiliki masa kini menjadi dasar untuk menentukan kualitas yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Atas dasar kualitas yang telah diidentifikasi maka kurikulum mengembangkan rancangannya dalam bentuk ide kurikulum. Ide kurikulum ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi dokumen kurikulum yang didalamnya terdapat berbagai komponen kurikulum. Pendidikan sejarah adalah merupakan mata pelajaran dan materi kurikulum yang tercantum dalam dokumen kurikulum.

Apabila sudah dapat ditentukan kualitas yang harus dikembangkan oleh kurikulum maka barulah kemudian dapat diajukan pertanyaan berupa seberapa banyak generasi mendatang harus mempelajari dan menguasai materi sejarah. Apakah seluruh peserta didik harus mempelajari materi sejarah sejak masa awal ada kehidupan di Indonesia atau bahkan dunia? Apakah seluruh peserta didik harus belajar materi sejarah sebagaimana dikenal dalam struktur ilmu sejarah? Apakah seluruh peserta didik harus belajar materi sejarah terpilih yang dianggap penting oleh masyarakat untuk suatu tujuan yang mengarah kepada kepentingan nasional? Apakah peserta didik tertentu harus mempelajari materi sejarah tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan lembaga pendidikan yang diikuti oleh peserta didik tersebut?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak selalu harus satu. Jika fungsi dan tujuan suatu lembaga pendidikan diperhatikan maka terdapat perbedaan antara fungsi dan tujuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMAK. Konsekuensinya maka pertanyaan yang diajukan harus pula sesuai dengan fungsi dan tujuan lembaga pendidikan tersebut dan barulah jawaban yang dapat diberikan sesuai pula dengan fungsi dan tujuan pendidikan sejarah untuk lembaga pendidikan tersebut.

POSISI AKADEMIK KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH

Sebelum membahas mengenai posisi legal pendidikan sejarah berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 19 tahun 2005, ada baiknya melihat posisi kurikulum pendidikan sejarah di berbagai negara pada saat ini. Studi O'Donnell (2002) memperlihatkan bahwa untuk Sekolah Dasar pendidikan sejarah diberikan hampir di semua negara yang menjadi sampel studinya kecuali Jepang, Singapura, Spanyol, dan Swis². Di keempat negara yang disebut terakhir ini pendidikan sejarah tidak diberikan dalam bentuk yang berdiri sendiri (kebanyakan dalam mata pelajaran studi sosial terkecuali di Spanyol yang dimasukkan dalam "knowledge of natural, sosial and cultural environment). Dalam kurikulum sekolah menengah pendidikan sejarah tercantum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri di England, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Singapura, Swis. Sedangkan di Irlandia terjadi keragaman antara berdiri sendiri dan "environmental and social studies", di Korea tergabung dalam "social studies" dan baru dipisahkan pada Sekolah Menengah Atas (usia 15-18). Di Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Amerika Serikat pendidikan sejarah adalah bagian dari "social studies". Di Australia masuk dalam mata kuliah "study of society and environment".

Dari dokumen yang dikeluarkan National Institute for Educational Research (1999) pendidikan sejarah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dalam kurikulum di China, Laos, Sri Lanka, Uzbekistan, dan Vietnam (di kelas 1-3 SD digabungkan dalam mata pelajaran Natural and Society). Di Malaysia tidak ada mata pelajaran sejarah atau pun social studies di SD tetapi sejarah diberikan secara terpisah sejak Sekolah Menengah Pertama. Di negara lain seperti Fiji, India, Selandia Baru, Filipina dan Thai dikemas dalam mata pelajaran social studies.

Secara tradisional pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya untuk mentransfer kemegahan bangsa di masa lampau kepada generasi muda. Dengan posisi yang demikian maka pendidikan sejarah adalah wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa. Melalui posisi ini pendidikan sejarah ditujukan untuk membangun kebanggaan bangsa dan pelestarian keunggulan tersebut. Makna pendidikan sejarah yang demikian tentu saja penting. Kehidupan bangsa masa kini adalah kelanjutan dari kehidupan bangsa masa lalu. Oleh karena itu sulit bagi generasi muda bangsa untuk dapat hidup sebagai bangsa jika dia tidak mengenal prestasi-prestasi besar yang telah dilakukan bangsanya. Sayangnya, makna yang demikian hanya memberi satu sisi dari warisan kehidupan bangsa dan melupakan sisi lain yang tidak cemerlang, menggambarkan kelemahan atau mungkin merupakan lembaran hitam dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa. Pengenalan pada kedua sisi tersebut akan menunjukkan jati diri bangsa dan ketika dikaitkan dengan kebermaknaan kehidupan masa kini maka generasi muda dapat mengambil pelajaran yang lebih baik dari sejarah. Sudah saatnya pendidikan sejarah tidak boleh hanya menjadi pewarisan nilai kecermelangan tetapi juga pelajaran dari kegagalan dan perilaku buruk bangsa.

Makna kedua pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik terhadap disiplin ilmu sejarah. Dalam jawaban ini maka pendidikan sejarah diposisikan sebagai pendidikan tentang cara berfikir keilmuan, pemahaman berbagai peristiwa sejarah yang menurut

² Negara yang dijadikan sample studi O'Donnell adalah England, Austria, Kanada, Perancis, Jerman, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swis, Amerika Serikat, dan Wales.

kategori ilmu adalah peristiwa penting, dan berbagai ketrampilan yang diperlukan dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu sejarah. Oleh karena itu kualitas seperti berfikir kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis dan penafsiran sejarah, kemampuan penelitian sejarah, kemampuan analisis isu dan pengambilan keputusan (*historical issues-analysis and decision making*)³ (NCHS, 1996: 6-7) menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah. Posisi jawaban ini menghendaki sejarah berdiri sebagai mata pelajaran mandiri dalam kurikulum. Relevansi diukur dari kepentingan disiplin ilmu dan materi kurikulum ditentukan berdasarkan kriteria relevansi ini. Apakah materi sejarah lokal perlu menjadi materi kurikulum didasarkan pada pertanyaan apakah materi sejarah lokal tersebut merupakan peristiwa penting yang layak mendapatkan perhatian dari sejarah. Jika ya maka materi sejarah lokal akan dijadikan materi kurikulum dan jika tidak maka materi sejarah lokal tersebut tidak akan dijadikan materi kurikulum. Kompetensi atau pun standar yang dikembangkan untuk kurikulum pendidikan sejarah dalam pandangan ini haruslah pula didasarkan pada hal-hal penting menurut pandangan ilmu sejarah.

Pendidikan sejarah dalam posisi ini adalah bentuknya yang paling esensial bagi sejarah sebagai wahana pendidikan untuk mencapai tujuan yang diperlukan sebagai seorang sejarawan. Dengan demikian tujuan lain di luar menjadi seorang sejarawan yang *nota bene* adalah pengembangan kemampuan potensi peserta didik pada ranah selain kognitif dianggap tidak layak dan bahkan merupakan penyimpangan dari pendidikan sejarah. Tujuan yang mengandung nilai dan berkenaan dengan ranah afektif adalah bukan menjadi tugas pendidikan sejarah. Dalam pandangan ini, mengembangkan semangat nasionalisme, persatuan, toleransi, cinta damai bukan pula tugas atau pun tujuan pendidikan sejarah. Standard seperti "students understand that being a good citizen involves acting in certain ways" atau "students describe the rights and individual responsibilities of citizenship" bukan tujuan pendidikan sejarah.

Jawaban ketiga terhadap pertanyaan dasar tersebut dikembangkan dari kepentingan bangsa, masyarakat, dan peserta didik sebagai individu. Jawaban terhadap pertanyaan dasar itu adalah kualitas bangsa, masyarakat dan individu apa yang diinginkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu pengembang kurikulum harus memiliki kualitas tersebut dan kemudian disusul dengan jawaban atas pertanyaan apa yang dapat disumbangkan sejarah (ilmu dan cerita) bagi pengembangan kualitas kemanusiaan yang diinginkan tadi. Fokus kurikulum di sini adalah pada manusia dan ilmu adalah menjadi salah satu sumber, bukan satu-satunya seperti pada posisi kedua, dalam menyediakan materi kurikulum.

Jawaban ketiga ini menyebabkan tujuan pendidikan sejarah tidak diarahkan untuk menguasai kompetensi atau kemampuan yang dianggap penting hanya oleh ilmu sejarah tetapi dianggap penting sebagai kemampuan yang dapat digunakan dalam kehidupan pribadi peserta didik dan dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat dan warganegara. Posisi jawaban ini menghendaki kebermaknaan belajar sejarah dilihat dari relevansinya terhadap kehidupan manusia umum (bukan sejarawan) di masyarakat. Tentu harus diakui bahwa jawaban terhadap pertanyaan dasar ini menyebabkan pemilihan materi pendidikan sejarah tidak lagi didasarkan pada kriteria penting-tidaknya menurut ilmu sejarah tetapi pada kriteria seperti yang dikatakan Jakubowski

³ Pengertian *historical issues-analysis and decision making* adalah kemampuan menganalisis dan menentukan apakah tindakan sejarah yang dilakukan oleh para pelaku sejarah tersebut merupakan keputusan yang baik dan mengapa dianggap sebagai keputusan yang baik.

(2002:7) "student who does something with the knowledge they learn will be in a better position to retain and find meaning in the information". Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari sejarah bagi kehidupan dinyatakan Borries (Stearns, Sexas dan Weinburg,2000:247) sebagai kemampuan berikut ini "morally judge historical events according to the standards of human and civil rights; explain the situation in the world today and find out the tendencies of change; acknowledge the traditions, characteristics, values, and tasks of our nation and society; values the preservation of historical relics and old buildings; internalize basic democratic value.

Atas dasar prinsip di atas maka pada jenjang pendidikan dasar maka alternatif jawaban ketiga dijadikan sebagai alternatif utama jawaban. Pendidikan sejarah dalam kurikulum pendidikan dasar haruslah mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masyarakat. Oleh karena itu posisi disiplin ilmu sejarah sebagai sumber materi untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang diperlukan peserta didik. Dalam posisi ini maka sejarah lokal akan memegang posisi utama karena ia berkenaan dengan lingkungan terdekat dan budaya peserta didik. Dalam tulisannya mengenai "Making Historical Sense", Wineburg (2000:310) mengemukakan tentang pentingnya sejarah lokal bagi para peserta didik sebagai berikut:

Each of us grows up in a home with a distinct history and a distinct perspective on the meaning of larger historical events. Our parents' histories shape our historical consciousness, as do the stories of the ethnic, racial, and religious groups that number us as a member. We attend churches, clubs, and neighborhood associations that further mold both our collective and our individual historical sense.

Dalam posisi ini materi sejarah lokal menjadi dasar bagi pengembangan jati diri pribadi, budaya dan sosial peserta didik. Seperti dikatakan Cartwright (1999:44) bahwa "our personal identity is the most important thing we possess" maka materi sejarah lokal akan memberikan kontribusi utamanya dalam pendidikan sejarah. Selanjutnya seperti dikemukakan Cartwright lebih lanjut bahwa identitas pribadi atau kelompok tersebut "defines who and what we are. The way we feel about ourselves, the way we express ourselves and the way other people see us are all vital elements in the composition of our individual personality".

Suatu catatan penting adalah materi sejarah lokal harus pula disajikan tidak dalam perspektif ilmu sejarah tetapi dalam perspektif pendidikan. Oleh karena itu keterkaitan dan penafsiran materi sejarah lokal jangan sampai menimbulkan konflik dengan kepentingan sejarah nasional dan upaya membangun rasa persatuan, perasaan kebangsaan, dan kerjasama antar daerah dalam membangun kehidupan kebangsaan yang sehat, cinta damai, toleransi, penuh dinamika, kemampuan berkompetisi dan berkomunikasi. Apa yang dikembangkan oleh New York State Department of Education dapat digunakan sebagai keterkaitan antara sejarah lokal dan nasional. Dalam dokumen yang dikeluarkan kantor departemen pendidikan negara bagian ini disebutkan standar bagi kurikulum pendidikan sejarah (History of the United States and New York) sebagai berikut:

1. The study of New York State and United States history requires an analysis of the development of American culture, its diversity and multicultural context, and the ways people are unified by many values, practices, and traditions.

2. Important ideas, social and cultural values, beliefs, and traditions from New York State and United States history illustrate the connections and interactions of people and events across time and from a variety of perspectives.
3. Study about the major social, political, economic, cultural, and religious developments in New York State and United States history involves about the important roles and contributions of individuals and group.

Arah tafsiran sejarah lokal ditentukan dalam bentuk keterkaitan dengan sejarah nasional. Kehidupan individual yang bukan menjadi kepedulian utama sejarah tetapi menjadi penting bagi pendidikan sejarah diperlukan dalam membangun berbagai nilai positif pada diri peserta didik. Ruang lingkup tema sejarah juga beragam dan tidak dibatasi pada tema sejarah politik memberikan gambaran kehidupan masyarakat dan tokoh secara utuh dan bagi peserta didik sebagai sesuatu yang isomorphic dengan apa yang mereka alami sehari-hari.

Dalam konteks semacam ini maka bukanlah suatu hal yang aneh jika pendidikan sejarah bertujuan mengembangkan kemampuan membaca, mematuhi aturan, disiplin, dan berbagai aspek kehidupan yang penuh nilai. Tentu saja tujuan seperti mengembangkan kemampuan berfikir sejarah, membangun kesadaran akan waktu, pemahaman terhadap peristiwa sejarah, berfikir kritis terhadap sumber/bacaan dan sebagainya dapat pula menjadi tujuan pendidikan sejarah di jenjang ini. Kurikulum Pengetahuan Sosial SD dan MI 2004 tampaknya sudah cukup mawadahi tujuan-tujuan yang dibicarakan di atas.

Pada jenjang pendidikan menengah terutama untuk sekolah umum (SMA) yang mempersiapkan peserta didik untuk meniti pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi maka alternatif jawaban kedua dapat dipilih sebagai jawaban utama terhadap pertanyaan dasar. Pada kurikulum pendidikan sejarah di sekolah ini maka kemampuan pemahaman mau pun skills yang diperlukan dalam disiplin sejarah sudah selayaknya diperkenalkan. Tujuan pendidikan sejarah seperti dikemukakan oleh NCHS yaitu historical thinking, historical analysis and interpretation, dan historical research capabilities dapat dikembangkan sebagai focus utama. Dalam konteks yang diusulkan Departemen Pendidikan New York maka tujuan seperti berikut dapat pula dikembangkan untuk kurikulum pendidikan sejarah di SMA:

- The skills of historical analysis include the ability to: explain the significance of historical evidence; the importance, reliability, and validity of evidence; understand the concept of multiple causation; understand the importance of changing and competing interpretations of different historical developments.
- Establishing time frames, exploring different periodizations, examining themes across time and within cultures, and focusing on important turning points in world history help organize the study of world cultures and civilizations.

Kemampuan semacam ini tampaknya masih kurang mendapatkan perhatian dalam Kurikulum Sejarah SMA dan MA 2004. Pemahaman terhadap peristiwa sejarah memang menonjol tetapi skills dalam sejarah serta pengembangan wawasan belum mendapatkan tempat yang seharusnya.

Posisi materi sejarah lokal yaitu peristiwa sejarah lokal tidak lagi sebagai sumber semata tetapi juga menjadi objek studi sejarah peserta didik. Dalam kesempatan inilah mereka belajar mengembangkan wawasan, pemahaman, dan ketrampilan sejarah. Mereka dapat berhubungan langsung dengan sumber asli dan mengkaji sumber asli dalam suatu proses penelitian sejarah. Mereka dapat melatih diri dalam penafsiran sejarah dan kalau pun terjadi berbagai perbedaan di antar mereka maka itu akan memiliki nilai pendidikan yang sangat tinggi. Lagipula, para sejarawan tidak pernah memiliki suatu pandangan dan tafsiran yang sama terhadap suatu peristiwa sejarah.

Perbedaan cerita sejarah yang dihasilkan karena perbedaan tafsiran antara peserta didik tentu akan pula terjadi. Disamping itu terjadi pula tafsiran lain yang dihadapi peserta didik dan bahkan masyarakat luas yaitu tafsiran yang dilakukan oleh media massa dan setiap keluarga. Oleh karena itu peserta didik dan masyarakat selalu berhadapan dengan berbagai versi cerita sejarah atau “alternative history”. Mengenai hal ini Levstik (2000:284) menulis:

In a multicultural democracy such as the United States, alternative histories also develop, but they are more overtly disseminated through family and cultural and religious associations as well as through such public channels as museums and print and visual media. Because of potential disparity between the version of history encountered in these contexts and that disseminated in schools – a site where some form of overarching national history is explicitly introduced – students in multicultural societies may be faced with reconciling the widely varied accounts of the past. In Hollinger’s view, such nation should aspire to a history “‘thick’ enough to sustain collective action yet ‘thin’ enough to provide room for the cultures of a variety of decent groups”.

Permasalahan besar yang dihadapi dalam mengembangkan materi sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan sejarah adalah ketersediaan sumber. Pendidikan sejarah, sebagaimana pendidikan lainnya, tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila sumber tidak tersedia. Tulisan-tulisan mengenai berbagai peristiwa sejarah lokal belum banyak tersedia. Tentu saja ini tantangan bagi sejarawan untuk dapat menghasilkan tulisan sejarah lokal sebagai dasar untuk mengembangkan materi pendidikan sejarah lokal. Pekerjaan yang dilakukan oleh para sejarawan dunia yang tergabung dalam World History Association (WHA) kiranya dapat dijadikan contoh dalam mengembangkan materi sejarah lokal.

PENDIDIKAN SEJARAH UNTUK KURIKULUM MENDATANG

Sesuai dengan ketentuan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 19 tahun 2005 maka pengembangan kurikulum pendidikan sejarah dimasa mendatang adalah tanggungjawab satuan pendidikan. Artinya, pengembangan kurikulum pendidikan sejarah untuk suatu SD atau SMP adalah tanggungjawab SD atau SMP tersebut. Demikian pula pengembangan kurikulum sejarah untuk suatu SMA. UU nomor 20 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) menentukan “pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan PP nomor 19 tahun

2005 pasal 16 ayat (1) menetapkan “penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP”. Panduan yang dimaksudkan oleh pasal 16 ayat (1) itu dijelaskan pada ayat (2) berupa model-model kurikulum.

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat (1) dan penjelasannya, pendidikan sejarah adalah bagian dari ilmu pengetahuan sosial (IPS). Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa bahan kajian IPS dimaksudkan untuk “mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat”. Penjelasan ini menempatkan materi pendidikan sejarah sebagai materi kurikulum dari SD sampai SMA walau pun harus disadari bahwa nama mata pelajarannya mungkin IPS, sejarah atau lainnya.

Selanjutnya dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 38 membedakan lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan supervisi terhadap pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. UU nomor 20 menyebutkan bahwa dinas pendidikan kabupaten/kota bertanggungjawab melakukan supervisi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Dinas Pendidikan propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi terhadap pengembangan kurikulum jenjang pendidikan menengah. PP nomor 19 tahun 2005 pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa lembaga yang bertanggungjawab melakukan supervisi tersebut adalah “dinas kabupaten/kota untuk SD, SMP, SMA dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK”. Perbedaan ini akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan di lapangan.

Kembali kepada ketentuan yang dinyatakan dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 35 ayat (2) maka Pemerintah perlu menetapkan standar untuk dijadikan “acuan pengembangan kurikulum”. Memang terdapat perbedaan dengan ketentuan dalam PP nomor 19 pasal 3 yang menyatakan bahwa “standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa standar isi mencakup “lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu”. Selanjutnya ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) standar isi “memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik”. Selain terjadi kontradiksi dengan UU nomor 20 tahun 2003 yang status hukumnya lebih tinggi terjadi pula kontradiksi internal dalam ketentuan PP 19 tahun 2005.

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi setiap tingkatan dan semester yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar (pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP nomor 19 tahun 2005). Sementara itu PP yang sama pada pasal 25 menetapkan “standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan meliputi “kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah”.

Pasal 6 ayat (1) PP nomor 19 tahun 2005 mengelompokkan mata pelajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah (bagi sekolah umum, kejuruan, dan khusus) atas lima kelompok yaitu :

- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kelompok mata pelajaran estetika;
- e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan

Menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 7 ayat (3), (4), (5) dan (6) dan penjelasannya, pendidikan Sejarah adalah termasuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengemasan pendidikan Sejarah diatur sebagai berikut:

- a. SD/MI/SDLB/Paket A sebagai bagian dari IPS
- b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B, sebagai bagian dari IPS
- c. SMA/MA/SMALB/Paket C, sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri diberikan di kelas X (semester 1 dan 2), di kelas XI dan XII IPS, IPA, dan Bahasa. Untuk IPS diberikan tiga sks setiap semester, Bahasa diberikan 2 sks setiap semester, sedangkan IPA diberikan satu sks setiap semester.
- d. SMK/MAK sebagai mata pelajaran IPS, “sekurang-kurangnya terdiri dari muatan dan/atau kegiatan ketatanegaraan, ekonomika, sejarah, sosiologi, antropologi, atau geografi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing”

Dengan posisi legal dari kedua dokumen tersebut maka pendidikan sejarah dapat dikenal dari dua kemasan yaitu IPS dan Sejarah. Baik dalam kemasan sebagai IPS mau pun sebagai Sejarah maka pendidikan sejarah harus memperhatikan kondisi masyarakat yang ada disekitar peserta didik, harus dapat mengkaji apa yang terjadi, dan menerapkan apa yang dipejari dari materi pendidikan sejarah dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan bahwa kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan melalui “muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan”. Artinya, IPS dan sejarah termasuk didalamnya harus pula memperhatikan dan bertanggungjawab terhadap pengembangan pendidikan agama dan akhlak mulia. Ketetapan ini sangat baik karena suatu kualitas yang kompleks seperti keyakinan agama dan akhlak mulia tidak mungkin dikembangkan oleh satu kelompok mata pelajaran apalagi satu mata pelajaran saja. Pengembangan keyakinan agama dan akhlak mulia haruslah menjadi kepedulian dan tanggungjawab setiap mata pelajaran sehingga terjadi proses penguatan yang dipersyaratkan dalam teori tentang pengembangan skills (intellectual atau pun psikomotorik dan motorik) dan sikap.

Sayangnya, prinsip yang dianut dalam pengembangan pendidikan agama dan akhlak mulia tidak digunakan dalam mengembangkan kewarganegaraan dan kepribadian. Dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian, pasal 7 ayat (2) kelompok mata pelajaran ilmu dan teknologi dan secara khusus mata pelajaran IPS tidak dilibatkan didalamnya. Muatan dan/atau “kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani” adalah materi dan kegiatan belajar yang diberi tugas untuk mengembangkan kewarganegaraan dan kepribadian.

Tentu saja ketetapan ini menyebabkan orang berfikir bahwa pengetahuan seseorang tentang bangsa dan kehidupan bangsa ini tidak perlu mendapatkan dukungan dari muatan dan/atau sejarah, geografi dan ketatanegaraan. Padahal sebagaimana diakui dalam banyak ketetapan kurikulum di berbagai negara yang telah dikemukakan di atas pemahaman mengenai sejarah, geografi, dan ketatanegaraan merupakan materi esensial untuk mengembangkan kewarganegaraan dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu ketetapan pada pasal 7 ayat (2) PP nomor 19 tahun 2005 tidak saja mengandung kelemahan dan bertentangan dengan hakekat pendidikan kewarganegaraan tetapi juga menghilangkan dukungan materi yang paling kuat untuk pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan memerlukan pemahaman mengenai karakter bangsanya. Pemahaman mengenai karakter bangsa hanya dapat dimiliki dengan baik apabila mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan bangsa tersebut dari masa lalu hingga sekarang. Pemahaman mengenai karakter bangsa memerlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai pemikiran para pendiri dan pejuang bangsa, menghargai apa yang telah mereka lakukan dengan segala kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki. Pengetahuan dan pemahaman mengenai pertumbuhan dan perkembangan bangsa tersebut hanya dapat dipelajari melalui materi sejarah. Pemahaman mengenai pemikiran para pendiri dan pejuang bangsa serta kemampuan untuk menghargai perjuangan tersebut hanya juga dapat dilakukan melalui materi sejarah. Oleh karena itu adalah sesuatu yang aneh jika materi sejarah tidak dimasukkan sebagai bagian dari pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian bangsa.

Hal yang sama berlaku juga bagi geografi. Karakter suatu bangsa, selain ditentukan oleh manusia yang berbuat juga ditentukan oleh wilayah dimana perbuatan itu dilakukan. Suatu bangsa berbuat sesuatu yang menjadi karakter bangsa itu juga ditentukan oleh sifat wilayah negaranya baik dalam pengertian cuaca, letak, ciri utama geografis dan sebagainya. Oleh karena itu adalah sangat tidak mungkin geografi tidak dijadikan muatan dan/atau kegiatan untuk pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian bangsa.

Demikian pula halnya dengan ketatanegaraan. Pemahaman mengenai ketatanegaraan adalah penting dalam berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan. Bukan kajian tentang sistem kenegaraan, pemerintahan, atau pun politik yang bersifat teoritik dan tidak membumi di Indonesia. Bukan pula kajian mengenai berbagai bentuk kenegaraan dan pemerintahan yang ada di dunia ini. Sistem pemerintahan yang dianut negara Indonesia adalah unik dan berharga dalam membentuk karakter bangsa dan memberikan cara warganegara berpartisipasi. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian bangsa harus memanfaatkan materi yang disediakan oleh ketatanegaraan. Sayangnya, pasal 7 ayat (2) PP nomor 19 tahun 2003 ini mengabaikan sumbangan penting yang dapat diberikan oleh materi sejarah, geografi dan tatanegara yang semuanya masuk dalam kelompok mata pelajaran ilmu dan teknologi.

KOMPETENSI PENDIDIKAN SEJARAH

Posisi teoritik sejarah di atas diterjemahkan dalam kurikulum sejarah SD, SMP, dan SMA masa mendatang sebagai berikut:

KOMPETENSI	JENJANG SEKOLAH		
	SD	SMP	SMA
1. MEMBACA	V	V	V
2. MEMAHAMI	V	V	V
3. BERKOMUNIKASI	V	V	V
4. MENGHARGAI	V	V	V
5. MENERAPKAN DALAM KEHIDUPAN	V	V	V
6. BERFIKIR HISTORIS		V	V
7. PENULISAN		V	V
8. PENELITIAN			V

Kompetensi di atas merupakan kompetensi yang tercantum dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum yang telah dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum pendidikan sejarah.

Selain itu arah kurikulum Pendidikan Sejarah di masa mendatang adalah sebagai berikut:

BAHASAN DALAM KOMPETENSI	JENJANG SEKOLAH		
	SD	SMP	SMA
1. TOKOH	V	V	V
2. BENDA SEJARAH	V	V	V
3. FAKTA SEJARAH	V	V	V
4. CERITA SEJARAH	V	V	V
5. PERISTIWA SEJARAH		V	V
6. REKONSTRUKSI			V

Di SD materi pendidikan sejarah berpusat pada sejarah keluarga, benda-benda bersejarah dan penting yang dimiliki keluarga sampai dengan sejarah tingkat propinsi. Materi sejarah nasional baru diberikan pada kelas V dan kelas VI. Kompetensi Dasar di kelas I s/d IV dikembangkan dari Standar Kompetensi IPS dan materi sejarah tidak diberikan pada setiap semester. Materi sejarah lokal sangat mendominasi materi sejarah untuk SD.

Di SMP materi pendidikan sejarah mulai dari zaman pra sejarah sampai dengan zaman yang paling terkini (reformasi). Pada SMP kompetensi dasar untuk setiap semester dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Sejarah, dan materi sejarah diberikan pada setiap semester. Urutan kronologis peristiwa sangat diperhatikan tetapi juga materi sejarah lokal mendapat tempat yang cukup.

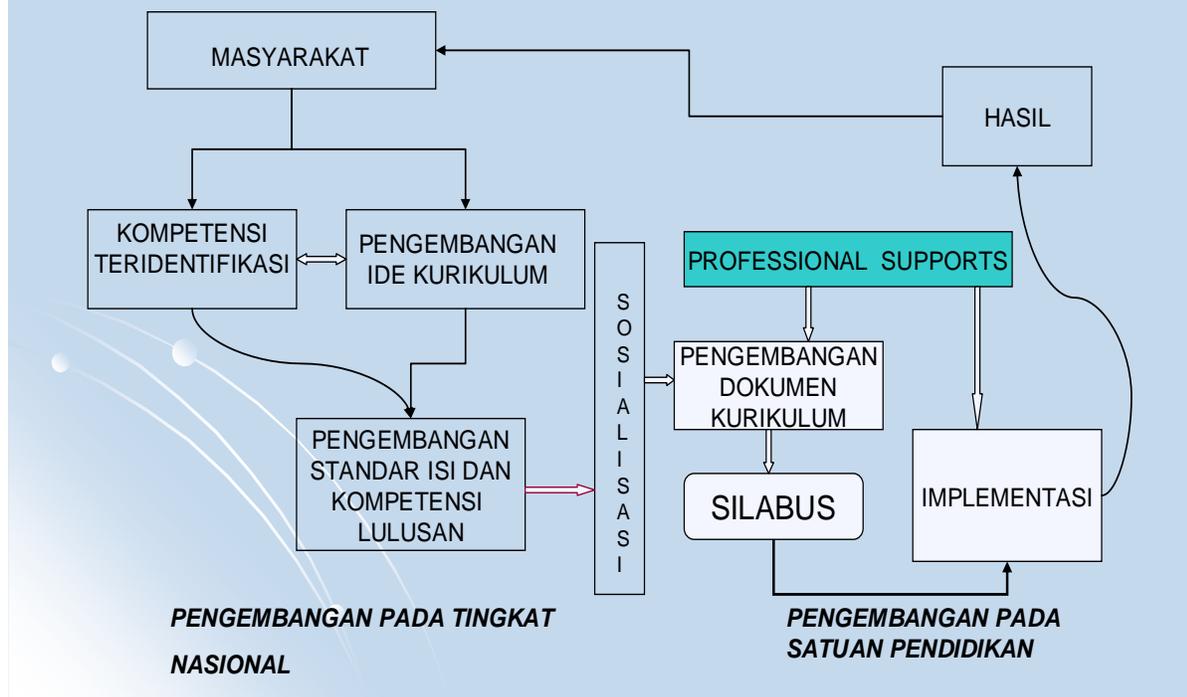
Di SMA materi pendidikan sejarah untuk kelas X sama untuk seluruh peserta didik sedangkan untuk kelas XI dan XII berbeda sesuai dengan penjurusan. Meski pun demikian peristiwa-peristiwa penting dalam Sejarah nasional mendapatkan perhatian khusus. Materi Sejarah Dunia diberi tempat di SMA.

Jawaban ketiga ini menempatkan posisi materi sejarah lokal sebagai materi kurikulum yang dasar terlepas apakah materi tersebut dikemas dalam mata pelajaran sejarah ataukah mata pelajaran lain. Posisi materi sejarah lokal dalam kurikulum dianggap penting karena pendidikan harus dimulai dari lingkungan terdekat dan peserta didik harus menjadi dirinya sebagai anggota masyarakat terdekat. Oleh karena itu dalam posisi ini materi sejarah keluarga, desa, kelurahan, kecamatan dan seterusnya menjadi penting karena ia hidup di lingkungan-lingkungan tersebut sampai kepada sejarah bangsa di mana ia adalah sebagai warganya.

PENGEMBANGAN KURIKULUM SEJARAH PADA SATUAN PENDIDIKAN

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 19 tahun 2005 maka proses pengembangan kurikulum pendidikan sejarah dapat digambarkan sebagai berikut:

RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN KURIKULUM



Dari diagram di atas jelas bahwa pengembangan kurikulum di suatu satuan pendidikan haruslah didasarkan pada pikiran kurikulum yaitu standar isi, kompetensi, dan standar lulusan kurikulum pendidikan sejarah. Ini memang tugas Pemerintah dan oleh karena itu proses sosialisasi harus dilakukan secara intensif, efektif, dan diikuti oleh setiap guru yang mengajar IPS atau sejarah. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka guru dibantu oleh Komite Sekolah dan disupervisi oleh kantor dinas pendidikan mengembangkan kurikulum sekolah atau satuan pendidikan. Hal ini mungkin saja dilakukan oleh setiap sekolah tetapi dapat pula dilakukan bersama dengan sekolah lain. Mengingat waktu, sumber dan tenaga yang dimiliki setiap sekolah maka pengembangan kurikulum untuk seluruh SD di suatu kabupaten dan kota lebih memungkinkan. Sedangkan pengembangan silabus dapat dilakukan oleh setiap guru secara individual.

Pada dasarnya silabus adalah rincian lebih lanjut dari suatu pokok bahasan. Dalam silabus guru harus menetapkan:

- kompetensi yang akan dikuasai (SK dan KD),
- materi ajar,

- proses pembelajaran peserta didik dan metode mengajar yang digunakan,
- sumber belajar,
- indikator dan asesmen hasil belajar

PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS KOMPETENSI

Fokus dari implementasi adalah proses pembelajaran. Proses ini melibatkan semua unsur pelaksana pendidikan, peserta pendidikan, kurikulum, kondisi belajar yang ada, dan kebijakan pendidikan. Perencanaan/silabus yang telah dilakukan guru diuji keterlaksanaannya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu pembelajaran adalah primadona setiap proses pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum. Proses pembelajaran yang dikehendaki oleh kurikulum sejarah berbasis kompetensi dimulai dari penyusunan silabus oleh guru. Silabus ini kemudian dikembangkan menjadi proses pembelajaran.

Setiap proses pembelajaran yang berkenaan dengan kompetensi terdiri atas kegiatan berikut ini:

1. Pencarian informasi
2. Pemahaman informasi
3. Penggunaan informasi
4. Pemanfaatan informasi

Keempat kegiatan pembelajaran ini perlu digalakkan karena pada saat sekarang kebanyakan proses pembelajaran sejarah yang terjadi berfokus pada pemahaman informasi. Kegiatan pencarian informasi, kegiatan penggunaan, dan pemanfaatan informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang sangat langka terjadi di kelas-kelas pembelajaran IPS/sejarah.

Kegiatan pencarian informasi yang sering terjadi di kelas-kelas IPS pada saat sekarang kebanyakan hanya bersifat satu arah dimana guru menjadi sumber informasi. Buku teks digunakan baru sebagai pengganti guru sebagai sumber informasi. Sumber informasi lain yang memerlukan kemampuan belajar mencari sumber, menentukan informasi yang relevan, dan mengumpulkannya belum menjadi suatu kenyataan umum di kelas IPS/sejarah. Guru-guru IPS di SD, SMP, atau pun guru mata pelajaran sejarah masih harus bekerja keras untuk merealisasikan kegiatan pencarian informasi ini. Pada saat sekarang dengan kurikulum IPS/sejarah berbasis kompetensi maka kegiatan mencari informasi yang dilakukan peserta didik harus mendapat tempat yang lebih dari apa yang terjadi pada saat sekarang. Metode pemberian tugas masih merupakan metoda yang menonjol dalam kegiatan ini dan hal ini akan berlanjut sampai peserta didik memiliki kemandirian dan inisiatif dalam kegiatan pencarian informasi.

Kegiatan pemahaman informasi berkenaan dengan upaya memahami isi yang terkandung dari suatu informasi. Sumber informasi yang tertulis atau terekam dengan teknologi elektronik memang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan sumber informasi lisan. Diantara keunggulan itu adalah sumber tersebut dapat dibaca ulang. Kegiatan belajar dalam implementasi kurikulum IPS/sejarah berbasis kompetensi harus menggunakan berbagai metode dan teknik agar peserta didik dapat memahami isi informasi dengan baik dan pada tingkat yang tinggi.

Peserta didik yang belajar IPS/sejarah harus dapat mengidentifikasi berbagai jenis informasi yang diperoleh dari suatu sumber: fakta, konsep, generalisasi, teori, prosedur, proses, nilai, ketrampilan psikomotorik dan sebagainya. Melalui berbagai cara yang paling menguntungkan bagi mereka maka pemahaman informasi tadi menjadi sesuatu yang mutlak. Jika ada peserta didik yang tidak memahami informasi tadi pada jenjang yang minimal mengenai jumlah informasi dan tingkat pemahaman informasi maka proses pemberian bantuan tambahan kepadanya harus dilakukan guru. Permasalahan yang paling menonjol dalam kegiatan pemahaman di kelas-kelas IPS/sejarah adalah kebanyakan peserta didik dibiarkan saja ketika mereka tidak mencapai jenjang minimal (standar) pemahaman. Ada peserta didik yang tidak cukup banyak informasi yang difahaminya tetapi banyak pula peserta didik yang memiliki jenjang pemahaman yang tidak cukup memadai. Ungkapan bahwa materi IPS/sejarah tidak bersifat sekuensial seperti materi matematika dan IPA, dan oleh karenanya tidak memerlukan jenjang pemahaman ketika ia pindah mempelajari materi lainnya sudah harus ditinggalkan. Kurikulum IPS/sejarah berbasis kompetensi sangat memberi tekanan (emphasis) pada kemampuan dan oleh karenanya maka ungkapan tadi sudah tidak dapat dipertahankan.

Dalam proses kegiatan pemahaman informasi apa yang dikemukakan Gagne tampaknya perlu mendapatkan perhatian. Ia menganjurkan apa yang dinamakannya dengan istilah *cognitive strategy*. Istilah ini mengandung makna bahwa kegiatan pembelajaran pemahaman informasi haruslah melatih peserta didik dengan berbagai cara untuk memahami informasi. Strategi yang digunakan haruslah strategi yang sesuai dengan entry behaviour peserta didik dan karakter belajar peserta didik.

Kegiatan penggunaan informasi adalah kegiatan menerapkan apa yang sudah dipahami dalam suatu konteks baru di kelas dan di sekolah. Kegiatan ini menghendaki peserta didik mampu menggunakan informasi yang telah diperolehnya. Dalam kegiatan ini peserta didik haruslah mendapatkan sesuatu yang berkenaan dengan apa yang telah dipelajarinya tetapi bukan suatu pengulangan. Peserta didik harus menggunakan konsep yang telah dipelajari untuk mempelajari sesuatu yang baru tadi, menggunakan prosedur dan proses yang sudah dipahaminya untuk mempelajari atau menyelesaikan masalah baru yang dihadapinya, dan menggunakan nilai yang sudah dipahaminya untuk menyelesaikan masalah baru yang sekarang ada di depan matanya. Dalam konteks ini maka pembelajaran IPS/sejarah tidak dapat dilepaskan dari berbagai keadaan dan masalah yang terjadi di masyarakat.

Kegiatan pemanfaatan informasi merupakan kegiatan yang tertinggi dan ini menjadi suatu kegiatan yang akan mengembangkan jati dirinya. Jika dalam penggunaan informasi peserta didik masih banyak mendapat bimbingan guru maka pada kegiatan pada tahap ini peserta didik akan melakukan pemanfaatan informasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas mereka.

Keempat kegiatan pembelajaran tersebut memang merupakan suatu yang tak terelakkan dalam suatu proses pembelajaran IPS/sejarah. Meski pun demikian, harus diingat bahwa keempat itu sendiri adalah kompetensi. Keempatnya harus menjadi kompetensi yang dimiliki dan menjadi jati diri peserta didik yang mengikuti kurikulum IPS/sejarah. Keempat kompetensi ini sangat

kritikal dalam membangun kemampuan peserta didik menghadapi tantangan kehidupan global yang sekarang sudah mulai dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai kompetensi maka keempat kegiatan belajar itu terkena pada karakteristik kompetensi yaitu memerlukan waktu panjang dan memiliki tingkat-tingkat penguasaan. Keempat kegiatan pembelajaran itu harus dikembangkan sejak SD sampai SMA/SMK. Bagan berikut ini menggambarkan jenjang penguasaan empat kegiatan tersebut dan kompetensi yang dicantumkan dalam kurikulum IPS/sejarah.

ASESMEN HASIL BELAJAR IPS/SEJARAH

Hasil belajar peserta didik kurikulum IPS/sejarah adalah kompetensi. Kompetensi tersebut dapat berbentuk pengetahuan, sikap, ketrampilan, minat, dan kebiasaan (habit). Berbeda dengan asesmen yang dilakukan saat sekarang dimana peserta didik "dibiarkan" tidak menguasai apa yang seharusnya menjadi hasil belajarnya maka dalam implementasi kurikulum IPS/sejarah berbasis kompetensi pelaksanaan semacam itu sudah harus ditinggalkan. Dalam asesmen hasil belajar kurikulum IPS/sejarah, guru harus mendapatkan informasi yang akurat tentang tingkat pencapaian peserta didik, melakukan perbaikan jika belum memenuhi persyaratan minimal, dan memiliki informasi yang akurat mengenai materi yang sulit dikuasai peserta didik. Perubahan orientasi dan pelaksanaan asesmen ini mutlak dilakukan dalam implementasi kurikulum IPS/sejarah berbasis kompetensi.

Apa yang dinilai dalam asesmen hasil belajar sejarah adalah:

- pengetahuan mengenai dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah lokal dan nasional
- kemampuan mengkomunikasikan pemahamannya mengenai peristiwa sejarah dalam bahasa lisan dan tulisan
- kemampuan menarik pelajaran/nilai dari suatu peristiwa sejarah
- kemampuan menerapkan pelajaran/nilai yang dipelajari dari peristiwa sejarah dalam kehidupan sehari-hari
- kemampuan melakukan kritik terhadap sumber
- kemampuan berfikir historis dalam mengkaji berbagai peristiwa sejarah dan peristiwa politik, sosial, budaya, ekonomi yang timbul dalam kehidupan keseharian masyarakat dan bangsa
- memiliki semangat kebangsaan dan menerapkannya dalam kehidupan kebangsaan
-

Untuk itu maka asesmen hasil belajar kurikulum IPS/sejarah harus memperhatikan hal-hal seperti berikut:

- frekuensi asesmen;
- alat asesmen yang digunakan;

- prosedur dan pelaksanaan asesmen;
- feedback mechanism

DAFTAR BACAAN

- Jakubowski, C.T. (2002). Teaching World History: Problems and Promises Faced by Young Teachers. *World History Bulletin*. XVIII, 2.
- Borries, Bodo von (2000). Methods and Aims of Teaching History in Europe: A Report on Youth and History, dalam *Knowing Teaching & Learning History: National and International Perspectives* (Eds. Stearns, P.N., Seixas, P., Wineburg, S.). New York: New York University Press.
- California State Board of Education (2000). *History-Social Science Content Standards for California Public Schools: Kindergarten through Grade Twelve*. Sacramento: California Department of Education
- Hasan, S.H. (2003). Strategi Pembelajaran Sejarah Pada Era Otonomi Daerah Sebagai Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Makalah
- Hess, F.M. (1999). *Bringing the Social Sciences Alive: 10 Simulations for History, Economics, Government, and Geography*. Boston: Allyn and Bacon.
- Hursh, D.W. dan E.W. Ross (2000). *Democratic Social Education: Social Studies for Social Change*. New York: Palmer Press.
- Jakubowski, C. (2002). Teaching World History: Problems and Promises Faced by Young Teachers. *World History Bulletin*. XVIII, 2.
- Lindquist, T. (1995). *Seeing the whole through social studies*. London: Heinemann
- NCSS (1994). *Curriculum standards for social studies: expectations of excellence*. Washington, D.C.: NCSS
- Nebraska, State Board of Education (1998). Nebraska Social Studies/History Standards: Grades K-12. [Online]. Tersedia: <http://www.nde.state.ne.us/SS/SocSSstd.html>. (25 Mei 2001).
- New York State Department of Education (1996). *Learning Standards for Social Studies*. Albany: The State Department of Education

- NIER (1999). *An International Comparative Study of School Curriculum*. Tokyo: National Institute for Educational Research.
- North Carolina State Board of Education (2004). North Carolina Standard Course of Study. Available at <http://www.ncpublicschools.org/curriculum/foreword>
- O'Donnell, S., et al.(2002). *International Review of Curriculum and Assessment Frameworks. Comparative Tables and Factual Summaries-2002*. London: National Foundation for Educational Research
- Koblin, D. (1996). *Beyond the Textbook: teaching history using documents and primary sources*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Levstik,L.S. (2000). Articulating the Silences: Teachers' and Adolescents' Conceptions of Historical Significance, dalam *Knowing Teaching and Learning History: National and International Perspectives, Knowing Teaching and Learning History: National and International Perspectives*, ed. Stearns,P.N., P. Seixas, dan S. Wineburg.
- Ministry of Education (?). *Social Studies in the New Zealand Curriculum*. Wellington: Learning Media.